

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP
KETEPATAN ANGGARAN
(PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO)**

Oleh

**LIAN NOHO
NIM. 921 410 110**

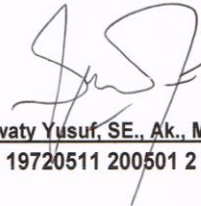
Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing I



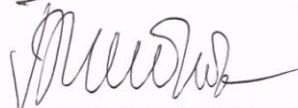
**Zulkifli Boku, SE., Ak., M.Si
NIP. 19720519 200212 1 001**

Pembimbing II



**Nilawaty Yusuf, SE., Ak., M.Si
NIP. 19720511 200501 2 001**

**Mengetahui
Ketua Jurusan Akuntansi**



**Sahmin Noholo, SE, MM
NIP. 19670617 200501 1 001**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penetapan UU No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 oleh pemerintah, mengenai Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, berimplikasi pada tuntutan otonomi yang lebih luas dan akuntabilitas publik yang nyata yang harus diberikan kepada pemerintah daerah (Halim, 2001:63). Selanjutnya, Undang-Undang ini diganti dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004. Kedua undang-undang tersebut telah merubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horisontal (kepada masyarakat melalui DPRD).

Pengelolaan pemerintah daerah yang berakuntabilitas, tidak bisa lepas dari anggaran pemerintah daerah, sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2009:21), yang mengatakan wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik. Anggaran merupakan alat perencanaan manajerial dalam bentuk keuangan yang berisi aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan selama periode waktu tertentu sebagai acuan kegiatan organisasi dan menunjukkan tujuan organisasi. Anggaran diperlukan dalam pengelolaan

sumber daya tersebut dengan baik untuk mencapai kejelasan sasaran anggaran yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat. Lingkup sektor publik di Indonesia mengenal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RAPBD diartikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Rancangan tersebut memuat pos-pos pendapatan dan belanja yang menjadi sasaran atau target yang hendak dicapai selama satu tahun.

Manajer dalam usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan perusahaan sangat memerlukan alat yang dapat membantu dalam perencanaan dan pengalokasian sumber daya yang terbatas. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk membantu perencanaan, koordinasi dan penilaian kinerja adalah anggaran. Proses penyusunan anggaran pada dasarnya merupakan proses penetapan peran dimana setiap manajer didalam organisasi diberi peran untuk melaksanakan kegiatan pencapaian sasaran yang ditetapkan oleh anggaran. Sehingga proses dalam penyusunan anggaran melibatkan berbagai tingkatan manajemen baik itu manajemen tingkat atas (*top level management*) sampai manajemen tingkat bawah (*lower level management*).

Penyusunan anggaran publik merupakan suatu proses yang cukup rumit. Hal tersebut berbeda dengan penganggaran pada sektor privat.

Anggaran pada sektor privat merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik. Sebaliknya pada sektor publik, anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik dan didiskusikan untuk mendapat masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik (Mardiasmo, 2009:53). Perubahan-perubahan atas rencana anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya lazim dilakukan. Praktik yang berlaku adalah anggaran murni dan anggaran perubahan. Anggaran murni adalah anggaran awal seperti terdapat dalam RAPBD. Anggaran perubahan adalah anggaran yang ditetapkan setelah RAPBD berjalan. Selisih besaran antara realisasi dengan anggaran yang ditetapkan ini menjadi perhatian utama. Besaran angka tersebut secara tidak langsung mengungkapkan kapasitas pegawai dalam penyusunan anggaran.

Secara teknis, perkiraan keadaan yang akan terjadi di masa mendatang menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan anggaran. Keadaan internal yang berada di bawah kendali semestinya bisa diakomodasikan dengan baik. Persoalan yang muncul adalah perubahan-perubahan eksternal yang berada di luar kendali sehingga sulit diperkirakan. Kemampuan melihat jauh ke depan semacam ini yang akan menentukan ketepatan anggaran dengan realisasinya. Selisih antara anggaran dengan realisasinya menjadi indikator "keberhasilan" penyusunan anggaran. Sebagai konsekuensinya, penyusun cenderung

selalu bersikap mencari aman dengan menetapkan anggaran pada angka yang relatif rendah dengan harapan agar dapat dengan mudah dicapai realisasinya.

Kesalahan memprediksi akan mengacaukan rencana yang telah disusun dan berdampak terhadap penilaian kinerjanya. Anggaran pada sektor publik meliputi aspek perencanaan, aspek pengendalian, dan aspek akuntabilitas publik. Anggaran sebagai perencanaan yang dimaksud adalah anggaran merupakan rencana kegiatan yang terjadi dari sejumlah target yang akan dicapai oleh para pimpinan dari suatu instansi dalam melaksanakan kegiatan tertentu pada masa yang akan datang. Anggaran tidak saja sebagai alat perencanaan keuangan dalam sistem pengendalian manajemen, tetapi juga sebagai alat pengendalian, koordinasi, komunikasi, evaluasi kinerja dan motivasi (Halim dan Husien, 2000) yang menyebabkan penelitian di bidang anggaran pada pemerintah daerah menjadi relevan dan penting.

Penelitian-penelitian tentang anggaran sudah banyak dilakukan, sementara penelitian tentang ketepatan anggaran masih sedikit dilakukan. Seperti penelitian Kusuma (2013) menunjukkan kejelasan sasaran anggaran dan komitmen organisasi berpengaruh positif pada ketepatan anggaran, dan ketidakpastian lingkungan berpengaruh negatif pada ketepatan anggaran. Bangun (2009) partisipasi dalam penyusunan anggaran dan struktur desentralisasi mempunyai pengaruh yang signifikan

terhadap kinerja manajerial SKPD, sedangkan kejelasan sasaran anggaran tidak mempengaruhi secara signifikan kinerja manajerial SKPD.

Kenis (1979) mengatakan terdapat beberapa karakteristik sistem penganggaran. Salah satu karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran menggambarkan lingkup anggaran yang dinyatakan secara jelas dan spesifik, dan dimengerti oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaiannya. Adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan pegawai untuk menyusun target-target anggaran. Selanjutnya, target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai organisasi. Hal ini berimplikasi pada ketepatan anggaran. Ketepatan anggaran terjadi apabila realisasi dari setiap kegiatan dalam organisasi tidak melebihi atau sama dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Penelitian ini memasukkan satu variabel independen, yaitu kejelasan sasaran anggaran dan satu variabel dependen yaitu dalam hubungannya dengan ketepatan anggaran. Latar belakang dipilihnya kejelasan sasaran anggaran, karena pada konteks pemerintah daerah, kejelasan sasaran anggaran tercakup dalam Rencana Strategik Daerah (Renstrada) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda) yang berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah sehingga realisasi tidak melebihi atau sama dengan anggaran yang ditetapkan sebelumnya maka ketepatan anggaran akan tercapai.

Fenomena yang ditemukan di pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango terjadi selisih antara anggaran yang ditetapkan sebelumnya dengan realisasinya seperti anggaran dan realisasi pada tahun anggaran 2010, anggaran pendapatan direncanakan sebesar Rp. 338,231 milyar lebih, realisasinya sebesar Rp 330,332 milyar lebih atau 97,66%, sedangkan anggaran belanja 2010 yang direncanakan sebesar Rp. 348,775 milyar lebih, terealisasi sebesar Rp. 322,765 milyar atau 92,54%. Anggaran dan realisasi pada tahun anggaran 2011, anggaran pendapatan direncanakan sebesar Rp. 439,975 milyar lebih, realisasinya sebesar Rp. 445,257 milyar lebih atau 101,28%, sedangkan Anggaran belanja 2011 yang direncanakan sebesar Rp. 451,209 milyar lebih, terealisasi sebesar Rp. 411,641 milyar lebih atau 91,23%. Anggaran dan realisasi 2012, anggaran pendapatan direncanakan sebesar Rp. 438,172 milyar lebih, realisasi sebesar Rp. 437,581 milyar lebih, sedangkan anggaran belanja Rp. 482,168 milyar lebih, realisasi sebesar Rp. 452,939 milyar lebih atau 93,94%.

Berdasarkan fenomena tersebut membuktikan pada tahun 2011 terjadi selisih ketidaktepatan anggaran antara anggaran yang ditetapkan sebelumnya dengan realisasinya. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti mengenai pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap ketepatan anggaran di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: adanya ketidaktepatan anggaran antara anggaran yang ditetapkan sebelumnya dengan realisasinya.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dibatasi dari segi kejelasan sasaran anggaran guna mengetahui pengaruhnya terhadap ketepatan anggaran di SKPD pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat penulis rumuskan adalah apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap ketepatan anggaran di SKPD pemerintah Kabupaten Bone Bolango?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah: Untuk menguji dan mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap ketepatan anggaran di SKPD pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan mengembangkan wawasan dalam bidang akuntansi khususnya tentang pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap ketepatan anggaran.
2. Manfaat praktis penelitian ini sebagai bahan masukan bagi aparatur pengelola anggaran di SKPD pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango dalam menyikapi fenomena yang terjadi sehubungan dengan variabel kejelasan sasaran anggaran terhadap ketepatan anggaran.